



CURUP

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

SPBU Akui Tidak Ada Struk, Alat Disambar Petir

CURUP - Setelah terungkap temuan Rp 1,3 miliar belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong, pihak SPBU pun angkat bicara. Manajemen SPBU

Simpang Nangka RL mengakui tidak memberikan struk atau nota pembelian BBM. Versi mereka alat struk rusak karena disambar petir.

Berdasarkan pemeriksaan LHP LKPD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2021, belanja BBM di DLH Rejang Lebong tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp 1.306.228.400.

Pengelola SPBU Simpang Nangka Efajri Fadillah dihubungi membenarkan kalau mereka menjadi rekanan DLH dalam belanja BBM DLH RL tahun lalu. Termasuk soal tidak adanya struk dari SPBU, juga diakui, karena saat itu alat atau Mesin Electronic Data Capture (EDC) rusak tersambar petir.

Untuk melakukan proses perbaikan atau pengadaan alat baru harus melalui proses yang tidak bisa sembarangan. "Benar, memang kita tahun 2021 kerja sama dengan DLH dan soal struk, saat itu mesin EDC kita rusak tersambar petir dan untuk perbaikan atau pengadaan baru tidak bisa sembarangan. Sehingga diganti dengan kupon untuk pembelian BBM DLH saat itu," sampai Elfajri.

Sementara itu, Plt. Kepala DLH Kabupaten RL Dhendi Novianto Saputra mengungkapkan, sejak Juli 2022 lalu, mereka sudah memutuskan kerja sama dengan SPBU Simpang Nangka. Mereka melakukan pembelian BBM di SPBU Simpang Korem Kecamatan Curup Selatan dengan pola langsung bayar sesuai struk yang diberikan para sopir.

kerja sama dengan SPBU Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang. Melainkan setiap hari kita bayarkan uang kepada sopir sesuai dengan struk pembelian para driver atau sopir kendaraan pengangkutan persampahan," sampai Dhendi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya kemarin.

Dilanjutkan Dhendi, untuk tahun ini pagu anggaran Belanja BBM sebesar Rp 1,216 miliar lebih. Namun seiring adanya perubahan harga BBM yang mengalami kenaikan beberapa kali sepanjang tahun 2022, mereka mengusulkan penambahan anggaran. Penambahan anggaran tersebut sebesar Rp 538,5 juta dan sudah diusulkan dalam rancangan APBD Perubahan TA 2022.

"Pagu anggaran awalnya Rp 1,216 miliar dan sudah kita usulkan tambahan anggaran sebesar Rp 538,5 juta di Perubahan APBD

TA 2022 yang saat ini dalam proses pembahasan. Kita usulkan tambahan karena beberapa kali sepanjang tahun 2022 ini harga BBM sudah mengalami kenaikan," demikian Dhendi.

Sebelumnya BPK melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja BBM pada DLH RL. Menunjukkan terdapat 29 kendaraan operasional persampahan. Meliputi 10 unit dump truck, 3 unit mobil armroll truk dan 4 unit kendaraan roda empat. Serta 9 unit motor gerobak roda tiga dan tiga kendaraan operasional sampah khusus.

Sopir kendaraan operasional tersebut melakukan pengisian BBM di SPBU setiap hari Senin dan Kamis. Membawa kupon BBM diperoleh dari Bidang Pengelolaan Sampah DLH. Adapun kupon digunakan terdiri dari jenis kupon BBM, yakni kupon BBM jenis dextrite dengan nilai kupon masing-masing 10, 12 dan 15 liter. Serta kupon BBM jenis pertalite dengan nilai tiga liter

Kupon tersebut diserahkan pada petugas SPBU pada saat pengisian BBM. Selanjutnya pihak SPBU akan melakukan penagihan pembayaran atas pengisian BBM setiap akhir bulan. Dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan semua kupon BBM yang telah dikumpulkan oleh petugas SPBU dari para sopir yang melakukan pengisian BBM.

Dokumen pertanggungjawaban disampaikan hanya berupa surat tagihan total atas BBM dari SPBU. Dengan melampirkan bukti kupon BBM yang dicetak DLH.

"Hasil penelusuran lebih lanjut atas tagihan tersebut menunjukkan tidak terdapat rekapitulasi penggunaan kupon BBM yang ditagihkan secara rinci dan tidak terdapat bukti struk atau nota pengisian BBM dari SPBU," bunyi audit BPK tersebut.

Selain itu, kupon BBM yang dilampirkan sebagai bukti belanja BBM juga tidak dapat diyakini kebenarannya karena hanya ditandatangani oleh sopir. Tidak terdapat tanda tangan dari petugas SPBU. Serta terdapat kupon yang tidak ditandatangani dan distempel oleh petugas SPBU. Pada kupon-kupon tersebut juga terdapat dua jenis stempel berbeda. Padahal berdasarkan keterangan dari pihak penyedia, hanya terdapat satu jenis stempel.

Hasil pemeriksaan BPK sendiri diketahui ada total jumlah SPBU yang tidak sesuai senyatanya dari dokumen pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp 80.308.800. Kemudian berdasarkan kondisi atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp 1.306.228.400 (Rp 1.306.537.200 - Rp 80.308.800) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dari temuan BPK itu juga diketahui bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh Peng-

guna Anggaran (KPA) pada DLH kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja BBM di lingkungan satuan kerjanya. Lalu Kepala Bidang (Kabid) Persampahan diduga tidak mempertanggungjawabkan belanja BBM sesuai dengan senyatanya. Diduga Bendahara Pengeluaran juga kurang cermat dalam melakukan pembayaran Belanja BBM.

Atas hal tersebut, Belanja BBM tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800 disetorkan ke kas daerah. Dalam perjalanannya diketahui, telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran Belanja BBM ke Kas Daerah Pemkab RL oleh DLH Kabupaten RL masing-masing Rp 60 juta pada 8 April 2022 dan Rp 20.308.800 pada 13 April 2022.

Selain itu, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Bupati RL untuk mengambil langkah atau memberikan intruksi kepada Kepala DLH selaku PA agar lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Belanja BBM. Lalu memerintahkan Kabid Persampahan untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM sesuai dengan ketentuan, memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi Belanja BBM sesuai ketentuan, melakukan evaluasi perjanjian dengan pihak SPBU untuk menggunakan nota print out sebagai bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan Belanja BBM yang tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800,00 ke kas daerah.

Selain kepada Bupati RL, BPK juga menginstruksikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten RL agar menguji keabsahan atas bukti-bukti Belanja BBM sebesar Rp 1,3 miliar dan atas bukti belanja yang terbukti tidak sah dan tidak riil agar disetorkan ke kas daerah. Kemudian memastikan bahwa Belanja BBM yang tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800,00 telah disetorkan ke